



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 68 TAHUN
2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang dicapai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 68 Tahun 2016;
 - b bahwa dengan adanya penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah serta penambahan terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Dharmasraya Nomor 63).
 9. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (berita daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 68) diubah sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan lampiran 1 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
2. Menambah 1 (satu) lampiran, yakni lampiran II sehingga berbunyi sebagaimana berbunyi dlaam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 3 Februari 2017
BUPATI DHARMASRAYA

ttd

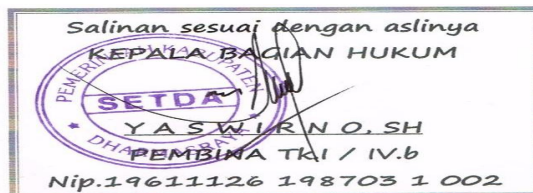
SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 3 Februari 2017
**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

ttd

LELI ARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 11



Lampiran I : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor : 11 Tahun 2017
Tanggal : 3 Februari 2017
Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

VISI : MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA

MISI :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun

TUJUAN :

1. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan
2. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pendidikan
3. Penyiapan dan penyaluran tenaga kerja terlatih
4. Peningkatan kesejahteraan sosial
5. Revitalisasi kawasan pasar dan pasar nagari
6. Membangun ruang publik untuk masyarakat
7. Peningkatan konektivitas permukiman dan ekonomi masyarakat
8. Peningkatan penyediaan Air Minum
9. Penyediaan perumahan dan lingkungan yang sehat
10. Mewujudkan ketahanan pangan
11. Peningkatan ekonomi petani
12. Peningkatan produksi industri lokal

13. Pengendalian pencemaran lingkungan
14. Penanggulangan bencana
15. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
16. Memantapkan sistem pembangunan daerah
17. Pembangunan sistem informasi pembangunan daerah
18. Melakukan pembangunan berbasis nagari
19. Meningkatkan peran adat dan kehidupan beragama
20. Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya Dharmasraya untuk memperkuat identitas Kabupaten Dharmasraya

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah

No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	Tahun	rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Meningkatnya tingkat pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran daerah	Menurunnya angka kemiskinan	Persen	Menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin terhadap seluruh penduduk daerah. Semakin rendah angka kemiskinan semakin baik,	Dinas Sosnakertrans	BPS
		Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	Suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei	Dinas Sosnakertrans	BPS
		Menurunnya tingkat pengangguran	persen	Memperlihatkan perbandingan antara Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja terhadap	Dinas Sosnakertrans	BPS

No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
				jumlah penduduk angkatan kerja, semakin rendah tingkat penganguaran semakin baik		
4	Tertanganinya permasalahan sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya yang terfalitasi sesuai aturan	jiwa	Menunjukkan jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya yang dibantu pemerintah kabupaten	BPML2NPPKB	BPML2NPPKB
		cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu	persen	Cakupan penanganan kejadian kekerasan terhadap perlindungan perempuan dan anak yang ditangani dengan baik	BPML2NPPKB	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	Meningkatkan perempuan dalam segala bidang serta menyediakan lingkungan ramah anak (layak anak)	BPML2NPPKB	BPML2NPPKB
5	Meningkatnya fungsi pasar sebagai pusat perdagangan masyarakat	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	Menunjukkan peran sektor perdagangan terhadap pembentukan PDRB	Dinas Kopperindag & UMKM	Dinas Kopperindag & UMKM
6	Meningkatnya fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat rekreasi dan interaksi masyarakat	Jumlah RTH yang terbangun dan nyaman	persen	RTH merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam	Dinas PU	Dinas PU
7	Meningkatnya fungsi kawasan dan objek wisata kabupaten	Jumlah kunjungan wisata	jiwa	Jumlah kunjungan wisata yang berkunjung ke daerah	Dinas Hubkominfoparbud	Dinas Hubkominfoparbud
8	Meningkatnya akses transportasi dan terbebas dari nagari tertinggal serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	Menunjukkan proporsi jalan yang berkondisi baik terhadap panjang jalan keseluruhan	Dinas PU	BPS
		Berkurangnya jumlah nagari tertinggal, terpencil dan sangat terpencil	nagari	Daerah dalam lingkup desa yang masyarakatnya serta wilayahnya	Bappeda	Bappeda
9	Meningkatnya wilayah pelayanan Penyediaan air minum perpipaan	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	persen	Jumlah rumah tangga terlayani air bersih dibagi jumlah rumah tangga se Kabupaten Dharmasraya	Dinas PU	Dinas PU
10	Meningkatnya penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin	Rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu*	persen	Tersedianya rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Dinas PU	Dinas PU

No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
11	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Jumlah Ketersediaan Kalori dan Protein Per Kapita.	Angka	Merupakan salah satu dari indikator SPM dalam Permentan Nomor Peraturan Menteri Pertanian No.65/Permentan/Ot.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	BKP3	BKP3
12	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat tani melalui peningkatan produksi pertanian,peternakan dan perikanan	Jumlah Produksi padi	Ton	Total produksi padi dalam satu tahun	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	BPS
		Jumlah Produksi jagung	Ton	Total produksi jagung dalam satu tahun	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	BPS
		Jumlah Produksi karet	Ton	Total produksi karet dalam satu tahun	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	BPS
		Jumlah Produksi sawit	Ton	Total produksi sawit dalam satu tahun	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	BPS
		Jumlah populasi sapi	Ekor	Jumlah populasi sapi dalam satu tahun	Dinas Peternakan dan Perikanan	BPS
		Jumlah produksi ikan	Ton	Total produksi ikan dalam satu tahun	Dinas Peternakan dan Perikanan	BPS
13	Meningkatnya peran koperasi untuk kesejahteraan masyarakat	Jumlahkoperasi dengan SHU meningkat	koperasi	Uu No.25 tahun 1992 tentang koperasi	Dinas Kopperindag & UMKM	Dinas Kopperindag & UMKM
14	Berkurangnya dampak pencemaran pada DAS Batang Hari	Persentase peningkatan penanganan pencemaran DAS Batang Hari	Persen	Penanganan dalam rangka pengurangan pencemaran DAS Batang Hari yang ditangani yang ter	BLH	BLH
		Persentase peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup (kabupaten)	persen	Perhitungan didasarkan pada perhitungan dasar pada masing-masing indeks kualitas air, udara, dan tanah	BLH	BLH
15	Meningkatnya pencegahan,tanggap,rekontruksi bencana daerah	Cakupan pencegahan, penanganan dan rekonstruksi paska bencana daerah secara baik	persen	Persentase pencegahan, penanganan kejadian bencana yang ditangani secara baik	BPBD	BPBD
16	Meningkatnya penyelenggaraan	opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WDP /TW/disclaimer	Penilaian BPK terhadap laporan keuangan daerah	DPPKD	DPPKD

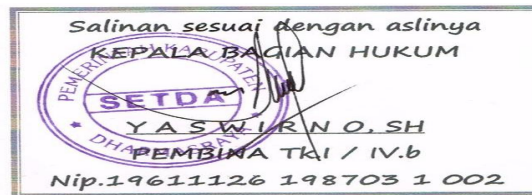
No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
	pemerintah yang bersih dan bebas dari praktek korupsi	persentase OPD yang tidak mendapat temuan tindak pidana korupsi yang material	persen	Jumlah OPD yang diaudit dibanding dengan LHP atas OPD yang diaudit yang terindikasi adanya temuan tindak pidana korupsi yang material	Inspektorat	Inspektorat
		Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP	Level 1-5	Menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu instansi	Inspektorat	Inspektorat
17	Meningkatnya pelaksanaan tahapan pembangunan daerah sesuai mekanisme yang ada	Persentase konsistensi perencanaan (RKPD) dan penganggaran tahunan (APBD)	persen	Menunjukkan kesesuaian antara RKPD dan APBD pada tahun pelaksanaan	Bappeda	Bappeda
18	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur daerah	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat/ nilai	Hasil evaluasi AKIP Kab. Dharmasraya. Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dinyatakan dalam nilai dan predikat	Setda	Setda
19	Meningkatkan pemanfaatan e-government dalam pembangunan daerah	Jumlah OPD yang memiliki website	OPD	Persentase OPD yang telah memiliki website	Dinas Hubkominfoparbud	Dinas Hubkominfoparbud
		Jumlah pelayanan elektronik guna mendukung penilaian e-goverment daerah (PeGI)	pelayanan	Jenis pelayanan elektronik guna kelengkapan penilaian elektronik yang terdiri dari e-planning, e-catalog, e-budgeting, e-tendering, ect	Dinas Hubkominfoparbud	Dinas Hubkominfoparbud
20	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa/nagari dalam rangka pembangunan	Persentase kelompok masyarakat nagari yang terlibat aktif dalam pembangunan nagari	persen	Ketrlibatan masyarakat nagari terlibat aktif dalam pembangunan	BPML2NPPKB	BPML2NPPKB
21	Meningkatnya harmonisasi khazanah dan warisan budaya masyarakat Dharmasraya.	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dan aparatur dalam kehidupan beragama.	persen		Dinas Pendidikan, Setda	Dinas Pendidikan, Setda
		Jumlah Lembaga/pemangku adat yang berperan aktif dalam kegiatan pembangunan dan budaya daerah	Lembaga	Jumlah kelembagaan adat setempat berbanding pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah	Dinas Hubkominfoparbud	Dinas Hubkominfoparbud
		Jumlah ekskavasi, kerjasama dengan BPCB, BPNP, BALAR dan perguruan tinggi dalam pengelolaan khazanah budaya Dharmasraya	dokumen	Pengelolaan khazanah budaya diimplementasikan dalam bentuk penyusunan dokumen, sosialisasi/seminar dan berbagai event budaya, hal ini bertujuan untuk : 1. revitalisasi budaya di Dharmasraya 2. apresiasi budaya	Bappeda, Dinas Hubkominfoparbud	Bappeda, Dinas Hubkominfoparbud

No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Penanggung Jawab	Sumber Data
				3. promosi budaya		

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKHA



Lampiran II : Peraturan Bupati Dharmasraya
 Nomor : 11 Tahun 2017
 Tanggal : 3 Februari 2017
 Tentang : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PERANGKAT DAERAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga					
1	Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Persen		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Rasio Ruang Kelas Siswa			
		Rasio Jumlah guru dibanding jumlah siswa	Guru/siswa		
		Jumlah Guru yang S1	Orang		
		Jumlah Guru yang Bersertifikasi	Orang		
2	Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	APK SD/MI/Paket A	Persen		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		APK SMP/MTs/Paket B	Persen		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		APM SD/MI	Persen	Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		APM SMP/MTs	Persen		Dinas Pendidikan, Pemuda dan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
					Olahraga
		Jumlah yang terakreditasi A SD	Sekolah		
		Jumlah yang terakreditasi A SMP	Sekolah		
		Rasio Guru dan Siswa SD	Guru/siswa		
		Rasio Guru dan Siswa SMP	Guru/siswa		
		Rasio Ruang Kelas Siswa SD	Siswa/lokal		
		Rasio Ruang Kelas Siswa SMP	Siswa/lokal		
		Jumlah Siswa Putus Sekolah SD	orang		
		Jumlah Siswa Putus Sekolah SMP	Orang		
		Angka Melanjutkan Sekolah SD	Persen		
		Angka Melanjutkan Sekolah SMP	Persen		
		Jumlah Kepala Sekolah Memiliki NUKS SD	Orang		
		Jumlah Kepala Sekolah Memiliki NUKS SMP	Orang		
3	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga	Persentase Kepala Sekolah yang Berkualifikasi S2	Orang		
		Persentase Guru yang Berkualifikasi S1	Orang		
		Jumlah Guru yang Mengikuti Diklat	Orang		
4	Meningkatnya kegiatan olahraga masyarakat	Jumlah cabang olah raga yang dibina	Cabang	Banyaknya cabang olah raga yang dibina pemerintah daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Jumlah komunitas kesegaran, olahraga, masyarakat yang aktif	Komunitas	Jumlah komunitas/ kelompok masyarakat yang rutin melaksanakan kesegaran jasmani dan olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2 Dinas Kesehatan					
1	Meningkatnya akses kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan yang terstandarisasi	Persen	Pelayanan kesehatan yang terstandar untuk menjamin pemerataan akses kesehatan bagi masyarakat	
		Rasio puskesmas, klinik, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Perseribu pernduduk	$rumus = \frac{Jumlah\ Puskesmas,\ klinik,\ pustu}{Jumlah\ penduduk} \times 1000$	Dinas Kesehatan
		Jumlah Pelayanan kesehatan difasilitas rujukan	Orang	Jumlah pelayanan kesehatan di rumah sakit yang sesuai standar untuk	Rumah sakit

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
		yang sesuai standar		memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat	
		Cakupan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Persen	Jumlah pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	
		Cakupan Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persen	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan	
		Cakupan Jaminan Persalinan	Persen	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan jaminan persalinan	
		Cakupan pelayanan kesehatan pada penduduk miskin di daerah terpencil, daerah sulit dan perbatasan	Persen	Jumlah pelayanan kesehatan pada penduduk miskin di daerah terpencil, daerah sulit dan perbatasan	
		Cakupan akses /jangkauan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	Memudahkan dan pemerataan jangkauan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang terstandar	
		Rasio posyandu per satuan balita (per 1000 balita)	Perseribu balita	$rumus = \frac{Jumlah\ Posyandu}{Jumlah\ balita} \times 1000$	
		Cakupan masyarakat miskin yang mendapat jaminan kesehatan	Persen	$rumus = \frac{Jumlah\ penduduk\ miskin\ yg\ mendapat\ jaminan\ kesehatan}{Jumlah\ Penduduk\ Miskin} \times 100$	
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	Persentase pasien masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan rujukan	
2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka kematian bayi (AKB)	Perseribu kelahiran hidup	Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-1 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu	
		Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	Per 100.000 Kelahiran hidup	Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup	
		Angka kematian anak Balita	Per seribu Jumlah balita	Jumlah kematian anak berusia 0-5 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi)	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
		Cakupan nagari siaga aktif	Persen	Jumlah nagari yang memiliki kesiapsiagaan untuk mengatasi masalah kesehatan secara mandiri	
		Cakupan air bersih dan sanitasi dasar	Persen	Jumlah rumah tangga yang memiliki air bersih dan sanitasi dasar memenuhi syarat	
		Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	Tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular TBC, HIV-AIDS dan penyakit menular lainnya	Persen	Persentase penemuan kasus disertai penanganan terhadap penderita penyakit menular TBC, HIV-AIDS dan penyakit menular lainnya	
		Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM)	Persen	Persentase deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM)	
		Cakupan ibu bersalin di fasilitas kesehatan	Persen	Jumlah ibu bersalin yang dibantu oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	
		Persentase Ibu Hamil mendapat pelayanan antenatal /K4	Persen	Pemeriksaan kehamilan yang diberikan oleh bidan atau dokter kepada ibu sebanyak 4 kali selama masa kehamilan, yaitu 1 kali pada trimester I; 1 kali pada trimester II dan 2 kali pada trimester III, baik di dalam maupun di luar gedung Puskesmas (Posyandu, Polindes, Kunjungan rumah, Rumah Sakit dan praktek swasta di wilayah kerja puskesmas) untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan	
		Persentase Ibu Nifas yang mendapatkan pelayanan (KF)	Persen	Jumlah kontak ibu setelah melahirkan sampai dengan 42 hari setelah melahirkan ke tenaga kesehatan	
		Persentase penanganan ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi	Persen	Jumlah penanganan ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi dibagi 20% dari sasaran ibu hamil	
		Persentase kunjungan neonatal lengkap (KN Lengkap)	Persen	Jumlah neonatal yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 3 kali (KN1, KN2, KN3)	
		Persentase kunjungan neonatal komplikasi yang ditangani	Persen	Jumlah neonatal dengan komplikasi yang ditangani dibagi 15% dari sasaran bayi	
3	Meningkatkan kesiagaan pelayanan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin kerja / izin praktek	Persen	Jumlah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di seluruh sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang memiliki izin praktek	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
	kesehatan	Jumlah Peningkatan dan penguatan kompetensi SDM kesehatan terhadap mutu layanan	Orang	Jumlah SDM kesehatan yang dilakukan peningkatan dan penguatan kompetensi dalam peningkatan mutu layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan peningkatan dan penguatan kompetensi / kapasitas SDM Kesehatan	Orang	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya.	
3 Rumah Sakit Umum Daerah					
1	Meningkatnya sistem tata kelola rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat	Jumlah Cakupan pelayanan dirumah sakit yang memenuhi standar mutu pelayanan	Orang	Pelayanan kesehatan yang terstandar untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu pada masyarakat	
		Perentase SDM kesehatan rumah sakit untuk menunjang peningkatan mutu layanan	Persen	Jumlah SDM kesehatan yang dilaksanakan peningkatan kompetensi dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	
		Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai standar kualitas rumah sakit	Persen	Jumlah pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit	
4 Dinas Pekerjaan Umum (PU, Tata Ruang, Perumahan)					
1	Lancarnya Transportasi dan Membuka Keterisoliran Antar Daerah	Banyaknya jembatan Permanen	Unit		
		panjang jalan dalam kondisi mantap	Km		
2	Meningkatnya penyediaan infrastruktur permukiman seperti jalan, drainase, air minum dikawasan perdesaan, kawasan kumuh, RSH	Cakupan pelayanan Air minum	Persen		
		Cakupan Pelayanan Air limbah	Persen		

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
		Panjang drainase/gorong-gorong yang dibangun	Meter		
4	Meningkatnya penyediaan infrastruktur permukiman seperti jalan, drainase, air minum dikawasan perdesaan, kawasan kumuh, RSH	Cakupan / Persentase Infrastruktur Perdesaan yang Layak Luas wilayah banjir	Persen		
5	Meningkatnya Saran dan Prasarana Pemerintahan	Sarana dan Prasarana Aparatur yang Representatif	Persen		
6	Berkurangnya Jaringan Irigasi Yang Rusak	Luas layanan jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun / ditingkatkan	Ha		
7	Meningkatnya Jumlah Sampah Terangkut dan yang dikelola TPA	Cakupan Pelayanan Persampahan	Persen		
8	Tercapainya keserasian pembangunan fisik dengan daya dukung lingkungan	Luas RTH yang terbangun	Persen		
9	Meningkatnya pelayanan persampahan dan sanitasi lingkungan	Cakupan Pelayanan Persampahan	Persen	$\frac{\text{tingkat pengelolaan sampah}}{\text{jumlah timbunan sampah}} \times 100$	Dinas PU
		Persentase kelayakan Prasarana dan sarana dasar pemukiman	persen	Persentase kelayakan prasarana dan sarana pemukiman yang berfungsi dengan baik	Dinas PU
5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas dan jumlah kapasitas aparatur perencana yang andal	Persentase personil Bappeda yang mengikuti diklat perencanaan			Bappeda
2	tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Nilai Sakip komponen perencanaan			Bappeda
		Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan perda			Bappeda
		Tersedianya dokumen perencanaan RKPD dan RKPD Perubahan yang ditetapkan dengan perbup			Bappeda
		Persentase keselarasan Renstra Perangkat Daerah terhadap RPJMD			Bappeda
		Jumlah dokumen KUA/PPAS dan dokumen Perubahan KUAP/PPASP yang ditetapkan melalui kesepakatan			Bappeda
3	Tersedianya dokumen perencanaan penataan ruang	Persentase dokumen tata ruang yang telah ditetapkan			Bappeda
4	pencapaian sasaran pembangunan daerah	Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan	Laporan		Bappeda
5	terselenggaranya data statistik sektoral	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral lingkup Kabupaten	Persen		Bappeda
6 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya					
1	Meningkatnya keselamatan dan keamanan	Persentase ketersediaan Rambu-rambu yang terpasang berdasarkan tingkat kebutuhan			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
	transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal	jumlah kasus kecelakaan			
		Tersedianya unit Pengujian Kendaraan yang berfungsi baik			
2	Meningkatnya Pelayanan regulasi bidang transportasi	Persentase angkutan yang memiliki yang memiliki KIR			
3	Meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten dibidang Pos, Komunikasi dan Informatika	jumlah Nagari dan kecamatan terjangkau layanan internet	Nagari		
		Jumlah kawasan publik yang tersedia jaringan internet gratis	Lokasi		
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat nagari	Persen		
4	Meningkatnya Pendataan/ Pelayanan dibidang Budaya dan Pariwisata	Jumlah organisasi dibidang Budaya dan Pariwisata yang aktif			
		Tingkat Hunian Hotel (kamar)			
5	Meningkatkan kualitas kesenian dan budaya daerah	Jumlah Grup Kesenian yang berkembang baik			
		Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya			
		jumlah pagelaran seni			
6	Pelestarian peninggalan kepurbakalaan dan sejarah	Benda , situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan			
		Revitalisasi nilai-nilai budaya			
7	Peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah kerjasama pariwisata			
8	Terjaminnya layanan sistem keamanan informasi serta	Persentasi OPD yang melaksanakan tata kelola penjaminan informasi berklasifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persen		

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
	meningkatkan pemanfaatan peralatan sandi	Kompetensi SDM dalam budang persandian yang belum sesuai kualifikasi kompetensi			
		Jumlah koordinasi persandian antar daerah dan dalam daerah	Kali		
		Jumlah peralatan sandi yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan persandian daerah			
7 Badan Lingkungan Hidup					
1	Meningkatkan Pembinaan terhadap kelompok Masyarakat Peduli Sampah dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan	Jumlah regulasi/ SOP manajemen pengelolaan sampah	Dokumen	Jumlah regulasi atau SOP atau kebijakan dalam rangka pengelolaan persampahan di kabupaten Dharmasraya.	PU, BLH
		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran	Unit	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran untuk pengelolaan sampah	BLH
		Jumlah studi kelayakan dan penyediaan pengelolaan sampah berbasis teknologi yang ramah lingkungan	Dokumen	Jumlah studi kelayakan dan penyediaan pengelolaan sampah berbasis teknologi yang ramah lingkungan (sistem 3R) di kabupaten Dharmasraya.	BLH, PU
		Jumlah pembentukan dan pembinaan kelompok peduli sampah dan bank sampah .	Kelompok	Jumlah kelompok masyarakat yang peduli sampah di kabupaten Dharmasraya.	BLH
2	Meningkatnya upaya Pengendalian dan Pengelolaan terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, serta memberikan Standar Pelayanan Prima Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah titik pantau adipura dan titik pantau GSB, serta pasar bersih	Titik pantau Kecamatan	Koordinasi kelompok masyarakat/ Nagari/ stakeholder yang berperan aktif dalam rangka persiapan titik pantau untuk penilaian adipura di kecamatan yang memenuhi kriteria dan titik pantau GSB (Gerakan SUMBAR Bersih), serta pasar bersih yang ditetapkan di Kabupaten Dharmasraya	BLH
		Persentase peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup (kabupaten)	Persen	Perhitungan didasarkan pada perhitungan dasar pada masing-masing indeks kualitas air, udara, dan tanah	BLH
		Jumlah data wilayah akibat kegiatan PETI yang menimbulkan kerusakan lingkungan.	Dokumen	Data pemetaan wilayah akibat kegiatan PETI yang ada di Kabupaten Dharmasraya yang dilaporkan dalam bentuk dokumen	ESDM, BLH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
		Jumlah usaha kegiatan yang melakukan pengelolaan Limbah B3 bagi kegiatan usaha (Perusahaan dan kegiatan usaha lainnya)	usaha/ kegiatan	Usaha/Kegiatan, perusahaan, Rumah Sakit/ Puskesmas/ Pusat Pelayanan Kesehatan, Bengkel yang menghasilkan limbah B3	BLH
		Jumlah dokumen tentang kajian dampak lingkungan Jenis Usaha dan Kegiatan	Dokumen	Dokumen pemantauan dan pengelolaan LH yang telah dilakukan kajian terhadap dampak lingkungan suatu jenis Usaha/ Kegiatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya.	BLH
		Jumlah usaha kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan pertambangan.	usaha/ kegiatan	Usaha/kegiatan pertambangan yang dibina dan diawasi yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan memiliki dokumen pengelolaan Lingkungan hidup	BLH, ESDM
		Jumlah usahakegiatan yang dilakukan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan dan upaya peningkatan kinerja perusahaan untuk capaian PROPER	usaha/ kegiatan	Pembinaan dan pengawasan pada usaha/kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan dan telah melakukan pengelolaan LH serta Pembinaan untuk mencapai PROPER yang dapat diraih oleh usaha/kegiatan/perusahaan.	BLH
		Jumlah Nagari yang menjadi sasaran pengelolaan Prokasi/ Superkasih	Nagari/ Kecamatan	Nagari yang telah melakukan pengelolaan LH untukProgram Kali Bersih (Prokasih) yang tertuang dalam Surat Pernyataan Kali Bersih (Superkasih)	BLH
		Jumlah kelompok pengembangan produksi ramah lingkungan	Kelompok	Terbentuknya kelompok masyarakat yang dapat mengembangkan produk ramah lingkungan/ olahan ramah lingkungan	BLH
		Jumlah kebijakan /regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Dokumen	Dokumen Perda/Perbup/regulasi lainnya yang berkaitan dengan Pengelolaan LH dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan LH.	BLH
		Jumlah koordinasi dan pembentukan Komisi AMDAL	Tim AMDAL	Koordinasi pembentukan Komisi Penilai AMDAL di Kabupaten Dharmasraya	BLH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
		Jumlah peran serta kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Kelompok	Terbentuknya kelompok masyarakat yang peduli dalam pengendalian, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup melalui sosialisasi LH	BLH
		Persentase pelaksanaan operasional UPT Labling BLH	persen	Terlaksananya operasional UPT Laboratorium Lingkungan di Kabupaten Dharmasraya.	BLH
		Jumlah partisipasi dunia usaha dalam pelaksanaan CSR terkait dgn bidang lingkungan hidup yang didukung dengan peraturan pelaksanaan CSR	usaha/ kegiatan	Perusahaan/usaha/kegiatan yang dapat berpartisipasi dalam CSR Bidang Lingkungan Hidup.	BLH
		Persentase perencanaan pembentukan BLUD Pengelola Limbah B3 di Kabupaten Dharmasraya	Badan Usaha	Persiapan kelembagaan dan dokumen perencanaan untuk pembentukan BLUD pengelola Limbah B3 di Kabupaten Dharmasraya	BLH
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholder terhadap perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Data Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	Sungai/ Mata Air	Tersedianya data sumber air dalam upaya pengelolaan sumber daya air.	BLH, PU
		Jumlah Nagari untuk pengembangan Ekowisata dan jasa Lingkungan, dan lahan akses terbuka	Nagari	Nagari yang akan dikembangkan untuk pemanfaatan kawasan ekowisata dan jasa lingkungan, serta pemulihan lahan akses terbuka	BLH
		Jumlah jorong/nagari yang terlibat dalam Pengembangan Dampak Perubahan Iklim melalui PROKLIM (Program Kampung Iklim) dengan pembentukan kampung iklim	Jorong/ Nagari	Jorong/Nagari yang akan dikembangkan sebagai kampung iklim dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.	BLH
		Jumlah luas wilayah Pemantauan kerusakan hutan dan lahan.	Ha	Pemantauan kualitas tanah/lahan pada kecamatan yang rentan mengalami kerusakan lahan untuk produksi biomassa.	BLH, Kehutanan
		Jumlah lokasi DAS dalam implementasi Program/ kegiatan rencana aksi penanganan permasalahan Sumber Daya Alam	Lokasi DAS	Koordinasi dan implementasi Program/ kegiatan rencana aksi dalam penanganan permasalahan dan pengelolaan Sumber Daya Alam	BLH
		Jumlah nagari yang terlibat dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Nagari	Tersedianya data KEHATI (Keanekaragaman Hayati) Kabupaten Dharmasraya.	BLH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
		Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Kasus	Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat tentang pengelolaan Lingkungan hidup yang diterima dan dapat diselesaikan.	BLH
		Jumlah kelompok pembinaan Kalpataru pada masyarakat, peduli lingkungan dan pembina usaha/ kegiatan	Kelompok	Pembinaan KALPATARU terhadap kelompok masyarakat yang peduli lingkungan, perorangan peduli lingkungan dan pembina usaha/kegiatan yang peduli lingkungan.	BLH
4	Meningkatnya upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan Sumber Daya Alam	Jumlah Luas lahan konservasi, dan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka	Ha	Luas kawasan/lahan yang dapat dilakukan konservasi untuk pemulihan lahan yang telah rusak dan sumber daya alam.	BLH
		Jumlah lokasi DAS dalam implementasi Program/ kegiatan rencana aksi penanganan permasalahan LH di DAS Batanghari	Lokasi DAS	Tersedianya data dan informasi tentang kegiatan rencana aksi untuk pemulihan DAS Batanghari.	BLH
		Jumlah data Monitoring, Identifikasi dan Evaluasi sumber dan beban pencemaran (Daya Tampung dan Daya Dukung), serta upaya penurunan beban pencemaran DAS Batanghari	Dokumen	Tersedianya data beban pencemaran untuk perhitungan daya tampung beban pencemaran DAS Batanghari.	BLH
5	Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber Daya Alam dan pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat dan Stakeholder terkait	Jumlah kecamatan yang dilakukan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan	Kecamatan	Sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup untuk peningkatan wawasan dan informasi LH kepada masyarakat dan stakeholder terkait.	BLH
		Jumlah data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup (SLHD)	Dokumen	Tersedianya data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup kab.Dharmasraya dalam dokumen SLHD (Buku Data dan Buku Analisis SLHD).	BLH
		Jumlah penyusunan data base Lingkungan Hidup	Dokumen	Tersedianya data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan yang dapat dipetakan di Kab.Dharmasraya, serta Perusahaan/usaha/kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan/ dokumen lingkungan (AMDAL/ UKL-UPL maupun SPPL.	BLH
		Jumlah luas data tutupan lahan	Dokumen	Tersedianya data tutupan lahan di Kabupaten Dharmasraya	Kehutanan, BLH
		Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)	Sekolah	Pembinaan sekolah (sekolah yang telah dibina sebelumnya dan yang baru dibina) untuk persiapan penilaian Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	BLH

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
				(ADIWIYATA) di Kabupaten Dharmasraya.	
6	Meningkatnya upaya pengendalian polusi melalui pengawasan, evaluasi, dan monitoring terhadap sumber polusi	Jumlah Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi.	Jenis	Pengadaan sarana dan prasarana tempat pembuangan limbah padat/cair yang menimbulkan polusi sebagai upaya mengurangi tingkat polusi.	BLH
		Jumlah kecamatan yang dilakukan Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Kecamatan	Sosialisasi pengendalian pencemaran terhadap sumber polusi dan sumber pencemar kepada masyarakat dan stakeholder terkait.	BLH
		Jumlah data monitoring dan evaluasi GRK dan pengawasan BPO (Bahan Perusak Ozon) pada usaha/kegiatan penghasil BPO	Dokumen	Usaha/kegiatan penghasil BPO yang dipantau dan diawasi oleh BLH Kab.Dharmasraya.	BLH
7	Meningkatnya Pengelolaan RTH / Taman Hijau	Jumlah kelompok dalam pengelolaan RTH	Kelompok	Terbentuknya kelompok masyarakat yang peduli dalam pengelolaan RTH	PU, BLH
8 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil					
1	Meningkatnya ketersediaan Dokumen kependudukan	cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	Persen	Jumlah kartu keluarga yang diterbitkan dibagi jumlah kepala keluarga keseluruhan kali 100 persen	
		Cakupan Penerbitan KTP	Persen	Jumlah KTP- eL dibagi jumlah wajib KTP-el kali 100 persen	
		Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	Persen	Jumlah Penerbitan akte kelahiran dibagi jumlah penduduk kali 100 persen	
		Cakupan Penerbitan Akte Kematian	Persen	Jumlah penerbitan akte kematian dibagi jumlah penduduk yang meninggal kali 100 persen	
9 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelatihan dan penyaluran tenaga kerja pemuda nagari terlatih	Jumlah pendidikan dan keterampilan yang diajarkan			
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan			
2	Meningkatnya pembinaan panti asuhan	Jumlah panti asuhan yang dibina			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
3	Meningkatnya fasilitas program transmigrasi nasional	Jumlah fasilitas satuan pemukiman transmigrasi			
10 Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah					
1	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	Persen	Jumlah pasar rakyat dalam kondisi baik	
2	Meningkatnya kegiatan ekonomi perdagangan di sektor pedagang eceran dan komoditi	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Persen	Menunjukkan besarnya persentase subsektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor terhadap pembentukan nilai PDRB	
		Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Persen	Standar deviasi harga kebutuhan pokok satu tahun dibanding dengan rata – rata harga kebutuhan pokok satu tahun	
3	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah alat UTTP bertanda tera sah	Unit	Jumlah alat UTTP yang diberi tanda tera sah	
4	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan daya saing koperasi dan usaha mikro	Jumlah koperasi aktif	koperasi	Jumlah koperasi aktif sesuai kriteria	
		Jumlah koperasi sehat	koperasi	Jumlah koperasi sehat sesuai kriteria	
		Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas	Pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha kriteria mikro menjadi pelaku usaha kriteria kecil	
5	Meningkatnya nilai produksi industri melalui peningkatan kualitas, kuantitas dan pemasaran produk komoditi daerah	Jumlah produk memiliki merk terdaftar	Produk	Jumlah produk yang telah terdaftar	
		Jumlah produk berlabel halal	Produk	Jumlah produk yang telah berlabel halal	
		Persentase kenaikan nilai produksi sentra Industri kecil menengah (IKM)	persen	Nilai produksi sentra IKM tahun n dikurangi nilai produksi sentra IKM tahun n-1 dibagi nilai produksi sentra IKM tahun n-1	
11 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik					

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
1	Peningkatan pendidikan politik masyarakat	Rasio pembinaan Ormas dan LSM terhadap total jumlah Ormas dan LSM	Persen		
		Rasio fasilitasi/koordinasi Admnistrasi Partai Politik terhadap total jumlah Partai Politik	Persen		
		Rasio forum diskusi politik terhadap total jumlah diskusi	persen		
2	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya minuman keras dan narkoba			
		Berkurangnya kasus konflik sosial			
		Peningkatan deteksi dini berbagai gangguan keamanan			
3	Peningkatan wawasan kebangsaan	Mennigkatnya pemahaman generasi muda terhadap NKRI	Jumlah		
		Menigkatnya pemahaman terhadap nilai – nilai kebangsaan			
		Peningkatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat			
12 Satuan Polisi Pamong Praja					
1	Meningkatnya Keamanan dan ketertiban umum	Berkurangnya pelanggaran Perda	persen		
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3			
		Rasio personil linmas per 10.000 penduduk			
		Rasio Pos Siskamling per jumlah nagari			
13 Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
1	Meningkatnya tanggap bencana daerah	Berkurangnya kasus bencana daerah	persen	Perhitungan data kejadian bencana	
		Tertanganinya evakuasi masyarakat saat bencana	persen	Perhitungan tertanganinya evakuasi bencana daerah	
		Penanganan Pasca bencana	persen	Perhitungan penanganan pasca bencana	
14 Sekretariat Daerah					
1	Terwujudnya system fasilitasi	Persentase OPD yang berkinerja baik			Setda

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
	penyempurnaan dan pengembangan kelembagaan serta ketatalaksanaan pemerintah daerah.	Persentase aparatur pemerintahan nagari yang dilatih			Setda
		Persentase penerapan SOP pada OPD			Setda
		Nilai Lakip komponen pelaporan			Setda
		Persentase UPT yang sesuai dengan kebutuhan dan berkinerja baik			Setda
		Persentase opini masyarakat terhadap PPID			Setda
		Persentase nagari berprestasi			Setda
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur nagari dan kecamatan			Setda
2	Adanya pengkajian produk hukum daerah sesuai peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum dan kepatuhan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan dan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM	jumlah rancangan produk hukum yang diproses sesuai dengan mekanisme dan pembentukan produk hukum daerah	dokumen		Setda
		jumlah produk hukum nagari yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	dokumen		Setda
3	Meningkatnya pengendalian pembangunan	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terpantau dalam pelaksanaan kebijakan daerah			Setda
		Persentase Sistem pelaporan fisik dan anggaran yang tepat waktu			Setda
		Jumlah pemantauan barang berbsubsidi			Setda
4	Meningkatkan kehidupan keagamaan di	Jumlah Lembaga Didikan Subuh yang terbina dan terlatih	unit	Jumlah unit didikan subuh yang terlaksana secara aktif	Setda

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
	tengah masyarakat				
15 Sekertariat DPRD					
1	Meningkatkan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten	Jumlah fasilitasi administrasi Peraturan Daerah (perda) yang ditetapkan			
2	Meningkatkan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota;	Persentase fasilitasi administrasi keuangan yang taat azas			
3	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten	Persentase penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten yang terselenggara baik			
4	Meningkatkan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli masing – masing fraksi yang diperlukan oleh DPRD kabupaten	persentase peningkatan dan kontribusi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD berupa pandangan – pandangan selaku tenaga ahli fraksi			
16 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah					
1	Optimalnya pengelolaan sumber PAD	Kontribusi PAD terhadap belanja daerah			
2	Meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah	Rasio Silpa terhadap seluruh APBD			
		Persentase laporan keuangan OPD 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir			
		Penyampaian Rancangan APBD maksimal tanggal 30 November yang dikirim ke Provinsi	Ya/tidak	Penyampaian Rancangan APBD tepat waktu ke Provinsi Sumatera barat	DPPKD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
		Penetapan APBD sebelum tahun anggaran pelaksanaan	Ya/tidak	Penetapan APBD dilakukan sebelum tahun anggaran pelaksanaan	DPPKD
17 Inspektorat Kabupaten					
1	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur pengawaan internal melalui pendidikan pelatihan	Persentase Aparatur pengawasan yang mengikuti diklat pengawasan			
2	Meningkatnya kualitas pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah	tertanganinya kasus pengaduan masyarakat yang masuk pada Inspektorat Kabupaten Dharmasraya			
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD dilingkungn Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi Laporan kinerja minimal B			
		Jumlah OPD yang membuat laporan keuangan sesuai SAP			
4	Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan	persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti			
		jumlah tertanganinya kasus gratifikasi			
18 Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Pengadaan Barang/Jasa					

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
1	Meningkatnya pelayanan iklim investasi daerah	Peningkatan realisasi investasi dari tahun – ketahun	persen	Perbandingan realisasi investasi dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan	
		Perusahaan yang aktif melakukan usaha	jumlah	Jumlah perusahaan yang aktif melakukan kegiatan usaha	
		Dokumen izin dan non izin yang diterbitkan	jumlah	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	
2	Optimalnya Penyelenggaraan lelang yang dilakukan tepat waktu	Lelang yang dilakukan tepat waktu	jumlah	Jumlah lelang yang dilakukan tepat waktu	
19 Badan Kepegawaian Daerah					
1	Meningkatkan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan perundang-undangan	Persentase pejabat eselon II yang telah mengikuti PIM II	persen		
		Persentase pejabat eselon III yang telah mengikuti PIM III	persen		
		Persentase pejabat eselon IV yang telah mengikuti PIM IV	persen		
		Persentase pejabat eselon IV yang telah mengikuti PIM IV	persen		
		Persentase pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional bagi tenaga fungsional	persen		
2	Meningkatkan ketaatan ASN terhadap peneparan sanksi pelanggaran aturan ASN	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN	persen		
3	Meningkatkan disiplin ASN terhadap mekanisme kerja	Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN	persen		
		Persentase pegawai yang datanya akurat	persen		

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
20 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh					
1	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	Jumlah penguatan Cadangan Pangan daerah	Ton		
2	Meningkatnya Distribusi dan akses pangan	Jumlah ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan akses Pangan di daerah	Nilai		
		Angka stabilitas harga dan pasokan pangan	Harga		
3	Meningkatnya Penganeka ragam dan keamanan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH).	persen		
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	persen		
4	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Jumlah penanganan daerah rawanan pangan	wilayah		
6	Berkembangnya Agribisnis pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan Kabupaten Dharmasraya di wilayah binaan nagari.	Jumlah kelompok tani naik kelas	kelompok		
		Persentase cakupan kelompok tani terhadap jumlah petani yang berkontribusi produktif terhadap peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Kelompok		
		Persentase penerapan teknologi tepat guna terhadap kelompok tani	kelompok		
21 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana					
1	Meningkatnya kesehatan keluarga	Jumlah peserta KB yang aktif			
2	Meningkatnya kelompok kegiatan dalam masyarakat, contohnya BKB, BKR, BKL, PKK, kelompok remaja, Dasawisma,	Jumlah kelompok kegiatan dalam masyarakat			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
	Kader, Posyandu, Kelompok perempuan.				
3	Meningkatnya kualitas hidup perempuan diberbagai bidang dan perlindungan perempuan dan anak dari bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi	Rasio KDRT; tingkat partisipasi perempuan disektor publik; penghapusan buta aksara perempuan, perlindungan tenaga kerja wanita, perlindungan lansia dan peningkatan ekonomi produktif perempuan.			
4	Sinkronnya perencanaan nagari dan meningkatnya ketersediaan basis data nagari	Pesentase nagari yang telah menetapkan RPJM Nagari			
		Pesentase nagari yang telah menetapkan RKP Nagari			
		Pesentase nagari yang telah menetapkan APB Nagari			
		Pesentase nagari yang telah Memiliki Profil Nagari			
		Pesentase nagari yang telah menetapkan APB Nagari			
		Persentase nagari yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu			
5	Meningkatnya peran dan kelembagaan Badan Usaha Milik (BUM) Nagari	Persentase nagari yang memiliki BUM nagari aktif			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
6	Adanya standar sistem pembangunan nagari di Kabupaten Dharmasraya yang siap menghadapi tantangan masa depan	Peningkatan penunggunaan teknologi informasi untuk data pembangunan nagari			
7	Adanya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Nagari yang berpartisipasi dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)			
8	Mengurangi ketimpangan gender, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan perempuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai HAM	Meningkatnya IPG, dan IDG			
		Persentase KDRT yang tertangani			
		Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan			
		Jumlah fasilitasi kegiatan perlindungan anak dan remaja			
9	Meningkatnya pemberdayaan lembaga-lembaga yang ada di Nagari				
10	Meningkatkan peran adat	jumlah fasilitasi kegiatan lembaga adat LKAAM, ABS-SBK, KAN, Hukum Adat			
22 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi					
1	Meningkatkan pengelolaan arsip secara baku di	Jumlah SDM pengelola arsip OPD yang dilatih	Orang		
		Jumlah urusan pemerintahan yang diklarifikasikan/ di jadwal retensi arsip (JRA) kan	Urusan		

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
	tingkat OPD				
2	Meningkatkan minat baca masyarakat pada perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah/ masyarakat yang melaksanakan manajemen perpustakaan sesuai dengan aturan	Unit		
		Jumlah pemustaka pada layanan perpustakaan keliling	orang		
23 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura					
1	Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kelompok tani/petani	Jumlah kelompok tani pangan yang dilatih	Kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang dilatih untuk peneingkatan keterampilan	
2	Swasembada padi, jagung dan bahan pangan utama lainnya	Produksi Padi	ton		
		Produksi Jagung	ton		
		Panjang Jalan Usaha Tani (JUT)	Km		
		Produktivitas padi/ha	Ton/ha		
		Peningkatan luas sawah	Ha		
3	Meningkatkan jenis tanaman hortikultura	jumlah jenis hortikultura yang dikembangkan	jenis		
24 Dinas Peternakan dan Perikanan					
1	Peningkatan populasi dan produksi peternakan	Produksi daging	Kilo		
		populasi sapi	Ekor		
		populasi ayam	Ekor		
		produksi telur	Kilo		
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	produksi ikan	Ton		
3	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah produksi olahan perikanan	kilo		

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
4	Menekan terjadinya kasus penyakit ikan dan ternak	Penurunan kasus penyakit rabies	Kasus		
		Penurunan angka kematian ternak akibat penyakit zoonosis dan strategis	Ekor		
5	Meningkatkan ketersediaan produk peternakan dan perikanan yang ASUH	Berkurangnya kasus daging oplosan	Kasus		
6	Pengembangan usaha dan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil produksi peternakan dan perikanan	Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil peternakan dan perikanan	Kelompok		
7	Mendorong terwujudnya kelompok peternakan dan perikanan yg berbadan hukum	Jml kelompok binaan yg berbadan hukum	kelompok		
25 Dinas Kehutanan dan Perkebunan					
1	Meningkatnya pemasaran hasil produksi perkebunan	stabilitas harga komoditi perkebunan			
		Jumlah pasar lelang yang berfungsi			
2	Meningkatnya luas lahan pengendalian hama penyakit dan ekplosif Organisme Pengganggu	Luas lahan yang dikendalikan hama penyakitnya (Ha)			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
	Tanaman (OPT)				
3	Meningkatnya produksi Perkebunan	Produksi Karet Produksi Kelapa Sawit			
4	Meningkatnya sarana dan prasarana perkebunan	Panjang Jalan Produksi yang berfungsi			
26 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral					
1	Tersediannya data perbandingan rumah terlistriki dengan rumah yang belum terlistriki (Rasio Elektrifikasi)/RE) dan Bantuan Listrik Miskin	Rasio elektrifikasi di tingkat nagari			
2	tersediannya data pelaku usaha yang mengusahakan air tanah dan pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sebagai sarana penunjang usaha komersial	Data jumlah penebaran air tanah di Kab. Dharmasraya			
27 Kecamatan					
1	Meningkatnya Kepuasan	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Definisi	Sumber Data
	Masyarakat dalam Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase peningkatan kualitas maupun uantitas PBB dan sumber PAD lainnya di wilayah kecamatan			
2	Meningkatnya Trasprantasi dan akuntabilitas kinerja dan Keuangan Pemerintahan	Persentase tersedianya laporan capaian kinerja dan dokumen perencanaan serta dokumen layanan publik yang baik			
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas umum pemerintahan kecamatan.	Persentase menurunnya kejadian gangguan trantibum yang ditangani aparatur kecamatan	Persen		
		Persentase verifikasi dana nagari yang dilaksanakan kecamatan melalui Siskuesdes	Persen		
4	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase tersusunnya skala prioritas musrenbang tingkat kecamatan	persen		
		Jumlah usulan Aspirasi Masyarakat Melalui Musrempang yang tertampung dalam RKPD	Kegiatan	jumlah kegiatan prioritas yang disepakati dalam musrenbang RKPD dikecamatan yang dapat ditampung dalam RKPD	

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISK

